

SONGSONG MUKTAMAR MUHAMMADIYAH

Din Syamsudin: Pilih Generasi Berdarah Segar

BANTUL (KR) - Menyongsong Mukhtar ke-48 Muhammadiyah, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Din Syamsudin, menegaskan kepemimpinan Muhammadiyah ke depan harus lebih baik karena tantangan di depan lebih besar.

Untuk itu, Din mengusulkan agar PP Muhammadiyah diisi oleh generasi 'berdarah segar'. Hal ini disampaikan Din Syamsudin saat menjadi narasumber acara Songsong Mukhtar ke-48 Muhammadiyah yang digelar PCM Muhammadiyah Sewon Utara di SMA Muhammadiyah Sewon, Minggu (13/11). Acara itu juga diisi dengan jalan sehat yang diikuti tidak kurang dari 2.000 peserta dan menyedekahkan 250 hadiah.

"Inilah yang harus dipikirkan oleh ang-

gota Tanwir, khususnya yang akan menyeleksi 93 bakal calon anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah pada Mukhtar Muhammadiyah nanti. Ada 250 anggota Tanwir yang akan memilih," ungkapnya.

Selain itu, Din juga berharap mukhtar ini menghasilkan keputusan tentang program kerja Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan terkait isu-isu strategis.

"Saya mengajak semua peserta mukhtar, termasuk anggota Tanwir, untuk berniat secara tulus ikhlas dengan membuka mata hati dan pikiran untuk bermusyawarah yang sebaik-baiknya. Saya menaruh harapan besar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan datang untuk meneruskan prestasi yang pernah disandang oleh Muhammadiyah," ungkapnya. (Jdm)-d

UNGGUL PRODUKTIVITAS DAN TAHAN PENYAKIT

Udang Galah Sijawa, Bernilai Ekonomi Tinggi

SLEMAN (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan HB X didampingi Bupati Sleman Kustini melakukan panen dan penyebaran benih udang Galah Sijawa di KPI Mino Lestari Brongkol Argomulyo, Senin (14/11). Sebelumnya dilakukan peresmian Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan.

Udang Galah Sijawa juga menebar benih Udang Galah Sijawa. Sebanyak 3.000 benih udang galah disebar di Kolam Kalurahan Argomulyo. Selanjutnya, Gubernur meresmikan Pasar Tradisional Perikanan Cangkringan sekaligus melakukan peninjauan pasar bersama kelompok Krido Baruno.

Menurut Gubernur, Pemda DIY ingin mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkembang di tingkat kecamatan.

Usai panen, Sri Sultan



KR-Istimewa

Gubernur Sri Sultan HB X didampingi Bupati Sleman Kustini menyebarkan benih udang galah sijawa.

an, bahkan di tingkat desa. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama dengan menciptakan lapangan kerja di desa.

"Pemberdayaan tersebut harus dimulai dari seluruh

perangkat desa dan didukung dari organisasi pemuda, seperti karang taruna. Kami akan terus mengawal Danais ini tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan SDM di desa-desa," katanya. (Has)-d

SANGGAR ANAK ALAM NITIPRAYAN

Gelar Pawai dan Pentas Seni Budaya

BANTUL (KR) - Rangkaian peringatan Hari Pahlawan, Sanggar Anak Alam (Salam), Forum Orang Tua Murid Salam bersama warga Nitiprayan, Kasihan Bantul, menggelar sejumlah kegiatan bertajuk 'Nggulawentah Pangan' (Mengolah Pangan) berupa prosesi tradisi 'Wiwitan', bekal buku dan diskusi pawai dan pentas seni budaya.

Pendiri Sanggar Alam Nitiprayan, Sri Wahyaningsih, mengungkapkan kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman sekolah Salam dan sekitar Nitiprayan, Kamis-Sabtu (10-12/11), dengan melibatkan para murid, wali-



KR-Khocil Birawa

Pawai dan Seni Budaya di Nitiprayan Kasihan Bantul.

murid dan warga sekitar Nitiprayan.

Jadwal kegiatan selengkap-lengkapnya, Kamis (10/11) pagi, prosesi 'Wiwitan', pawai dan pentas seni budaya terdiri bregada prajurit, para murid Salam memanggul 'Gunungan' berbahan sayur mayur, Tari Edan-edanan, Tari Tolak Balak dimainkan Sanggar

Tari Nitiprayan. Kemudian bedah buku berjudul 'Manusia tanpa Sekolah' jejak pemikiran Toto Raharjo ditulis oleh Rony K Pratama, tampil menjadi pembicara bersama Elok Santi (dosen Sosiologi UGM), Agita Yuri (orangtua Salam), digelar di sekolah Salam, Jumat-Sabtu (11-12/11) siang. (Cil)-d

TMF UMY Latih Perkuat Kelembagaan Pokdarwis

BANTUL (KR) - Pariwisata yang menjadi andalan pemulihan ekonomi pascapandemi, menjadi perhatian untuk segera dibenahi. Maka pembekalan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya agar lebih berkompeten, menjadi kunci. Mengingat tidak sedikit desa wisata yang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata pun masih banyak yang belum mempunyai sistem yang terintegrasi dengan baik.

Dosen UMY sekaligus Ketua Tim Marching Fund UMY, Sakir Ridho Wijaya

SIP MIP, Jumat (11/11), mengemukakan pelatihan diikuti anggota Pokdarwis Kelurahan Banyurejo Tempel, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UMY dan Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI). Pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Tempel Sleman.

Pelatihan dilakukan bersama Tim Matching Fund (TMF) UMY tujuannya untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Pokdarwis

ini merupakan salah satu program dari tim Matching Fund UMY dalam membentuk Creative Tourism Village yang terintegrasi. Pokdarwis menjadi landasan bagi desa wisata kreatif dalam mengembangkan sektor pariwisata mereka.

Matching Fund sendiri merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bentuk dukungan dalam membentuk kolaborasi antara lembaga perguruan tinggi dengan pihak industri. (Fsy)-d

BANYAK MANFAAT DIDAPAT MASYARAKAT Serentak, Pengerjaan Padat Karya di 59 Titik



KR-Judiman

Warga Karangtempel mulai mengerjakan proyek Padat Karya.

BANTUL (KR) - Program padat karya infrastruktur anggaran perubahan APBD Bantul 2022 di 59 lokasi se-Kabupaten Bantul, dimulai Senin (14/11). Masing-masing titik dianggarkan Rp 100 juta. Termasuk sasaran padat karya di Karangtempel Pendowoharjo Sewon Bantul.

Pukul 07.00, para pekerja padat karya sudah mulai mengerjakan jalan corblok di wilayahnya. Ketua RT 42 Karangtempel yang juga Ketua Kelompok Padat Karya, Sugito, didampingi Maryono menjelaskan, program padat karya di Karangtempel membuat jalan corblok di tiga titik, yakni titik 1 sepanjang 117 meter, lebar 3 meter, tebal 0,12 meter. Titik 2, panjang 22 meter, lebar 3,5 meter, tebal 0,12 meter dan titik 3

panjang 20 meter, lebar 4,5 meter tebal 1,2 meter.

Jalan pedukuhan tersebut sekitar tahun 2009 sudah pernah diaspal, tapi kondisi sekarang sudah rusak. Karena itu lewat Musrenbang pedukuhan, warga RT 42 Karangtempel mengajukan permohonan agar bisa mendapatkan jatah pembangunan melalui program padat karya infrastruktur.

"Alhamdulillah melalui prosedur yang sudah ditentukan, akhirnya permohonan warga bisa terlaksana mendapat jatah program padat karya dari anggaran perubahan APBD 2022," papar Sugito.

Program padat karya di Karangtempel ini menurut Sugito, sangat bermanfaat bagi warga. Dari segi ekonomi, bisa membantu masukan pendapatan bagi war-

ga kurang mampu, walaupun hanya bersifat sementara.

Karena tenaga kerja yang mengerjakan program padat karya mengutamakan warga kurang mampu, termasuk warga penerima PKH dan yang tidak punya pekerjaan. Jumlah tenaga kerja ada 20 orang dan selesai sampai 17 Desember 2022.

Dari segi kemanfaatan, jalan ini berfungsi sebagai penghubung antar-RT maupun antarpedukuhan dan menuju ke Kantor Kapanewon Sewon. Keberadaan jalan ini juga membantu kelancaran ekonomi warga.

Jalan ini karena menggilangi gedung SMP 3 Sewon, sehingga akan bermanfaat sekali bagi siswa untuk olahraga lari maupun jalan cepat. "Kami sangat berterimakasih kepada pemerintah yang membantu warga dengan bentuk pembangunan jalan corblok ini, yang menambah semangat kami dalam memajukan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Sementara Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Tirul Widilastuti SIP MPA, berpesan kepada warga penerima program padat karya, untuk menjaga kualitas pekerjaan. "Jika menerima setoran material yang tidak sesuai ketentuan segera laporkan ke Disnakertrans Bantul," harapnya. (Jdm)-d

RAKER KOMITE III DPD RI DENGAN PEMDA DIY Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Cagar Budaya



KR-Devid Permana

Komite III DPD RI bersama stakeholders di lingkungan Pemda DIY.

YOGYA (KR) - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan kunjungan kerja (Kunker) dan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gedhong Pracimosono, kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Senin (14/11). Rapat kerja ini dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Kunjungan kerja Komite III DPD RI di DIY ini diikuti oleh Ketua Komite III Hasan Basri dari Kaltara, Wakil Ketua Komite III Habib Ali Alwi dari Banten serta para Anggota Komite III DPD RI, yaitu Cholid Mahmud (DIY), Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Edwin Pratama Putra (Riau), Arniza Nilawati (Sumse), Eni Khairani (Bengkulu), Jihan Nuriela (Lampung).

Kemudian, Sylviana Murni (DKI Jakarta), Amang Syafrudin (Jabar), Bambang Sutrisno (Jateng), Ahmad Nawardi (Jatim), Asyera Respati A Wundalero (NTT), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel), Zainal Arifin (Kaltim), Djafar Alkatiri (Sulut), Muhammad J Wartabone (Sulteng), Matheus Stefi Pasimanjeko (Maluku Utara).

Adapun stakeholders di DIY yang diundang dalam rapat kerja, antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya Kemdikbud DIY, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya DIY, Tim Ahli Cagar Budaya DIY, Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan kabupaten/kota se-DIY, Barahum DIY, Pokdarwis Pemerhati Cagar

Budaya Candirejo, Akademi FIB UGM dan Badan Otorita Borobudur.

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri menuturkan, pelestarian cagar budaya dalam implementasinya dihadapkan pelbagai tantangan. Meski pelestarian cagar budaya telah diatur di UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, faktanya, masih ditemukan cagar budaya yang rusak bahkan musnah.

Hal ini dipersukar oleh minimnya kesadaran masyarakat akan pelestarian cagar budaya. Belum lagi keterbatasan tenaga ahli cagar budaya di daerah yang merata dan bersertifikat kompetensi, turut andil sebagai persoalan yang menuntut penyelesaian dari semua pihak.

"Atas dasar kondisi cagar budaya di atas maka DPD RI dalam hal ini Komite III DPD RI sebagai alat kelengkapan, terpanggil untuk turut berkontribusi melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya," ujarnya.

Menurut Hasan Basri, pengawasan dimaksud dilakukan dengan di antaranya metode kunjungan kerja untuk menggali fakta-fakta dan persoalan terkait implementasi UU Cagar Budaya, khususnya sebagai upaya pelestarian cagar budaya. Apalagi dengan berkembang pesatnya modernisasi dan globalisasi yang apabila tidak diantisipasi akan semakin menggerus eksistensi cagar budaya di Tanah Air.

Selain hal menyangkut cagar budaya, pada kunjung-



KR-Devid Permana

Rapat kerja Komite III DPD RI dengan Pemda DIY.



KR-Devid Permana

Hasan Basri (kanan) dan Paku Alam X bertukar cenderamata.

ngan kerja ini, DPD RI juga tengah menyerap pemikiran dan aspirasi publik menyangkut inisiasi DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelestarian Budaya Adat Istitiad Kerajaan. RUU Pelestarian Budaya Adat Istitiad Kerajaan diajukan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong rekognisi negara atas kearifan lokal adat istiadat kerajaan.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY Paku Alam X menuturkan, bahwa urusan kebudayaan (termasuk hal-hal yang menyangkut cagar budaya) merupakan salah satu pilar pembangunan di DIY. Dalam kaitannya dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di DIY diakomodasi dengan menerbitkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Perda ini sekaligus juga dilatarbelakangi pertimbangan, bahwa problematika yang terjadi di DIY membutuhkan penyelesaian melalui

pengaturan yang mengandung muatan lokal. "Dengan kata lain, Perda ini dibentuk guna menyelaraskan dan memudahkan implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan cagar budaya," katanya.

Menurut Gubernur, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam setiap upaya pelestarian cagar budaya di DIY. Yaitu DIY memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejahteraan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta. Kesemuanya itu harus senantiasa dijaga kelestariannya.

Kemudian, warisan budaya dan cagar budaya di wilayah DIY merupakan kekayaan kultural, yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya. Sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. (Dev)